



DIBUKA HINGGA AKHIR MASA KAMPANYE

Pemkot Buka Layanan Pemasangan APK

YOGYA (KR) - Sejak Perwal 75/2023 terkait pemasangan alat peraga kampanye (APK) dan bahan kampanye diberlakukan, Pemkot Yogya membuka layanan konsultasi. Layanan tersebut dibuka di Mal Pelayanan Publik (MPP) kompleks Balaikota Yogya hingga berakhirnya masa kampanye pada 10 Februari 2024.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) Kota Yogya Budi Santosa, menjelaskan loket tersebut ditujukan untuk memberikan kemudahan bagi pengurus partai politik, caleg maupun simpatisan dalam melaksanakan kampanye agar tertib aturan. "Adanya layanan bermula ini dari pemenuhan kewajiban instansi kami untuk memberikan izin pemasangan APK karena sudah terbit perwalnya," jelasnya, Rabu (6/12).

Layanan yang diberikan oleh DPMPPTSP Kota Yogya tersebut dibuka setiap hari kerja pada jam 08.00-14.00 WIB. Loket tersebut dapat dimanfaatkan untuk melakukan konsultasi terkait lokasi, kesulitan dalam pengajuan permohonan melalui aplikasi bahkan masyarakat dapat melakukan aduan terkait pemasangan reklame atau balho yang belum mendapatkan izin pasang yang akan diteruskan ke pihak Bawaslu maupun KPU.



KR-Ardhi Wahdan

Pemasangan bendera sejumlah parpol sudah marak terjadi sejak beberapa waktu lalu di sejumlah titik di Kota Yogya.

Permohonan izin pemasangan APK sebenarnya juga bisa difasilitasi secara online melalui aplikasi Jogja Smart Service (JSS). Akan tetapi desk manual tetap harus diberikan lantaran regulasinya cukup detail supaya pemohon tidak mengalami kesulitan.

Budi Santoso berharap, dengan adanya loket konsultasi tersebut pesta demokrasi pada tahun 2024 dapat dilaksanakan dengan tertib oleh seluruh pihak. Dengan begitu Kota Yogya bisa terlihat estetik, bersih, indah dan tertib.

"Harapannya pelaksanaan kampanye bisa sesuai regulasi sesuai de-

ngan yang sudah disepakati, baik pemasangannya, kontennya kemudian juga durasi waktunya. Tanggung jawab kita selesai pada saat pemberian izin dalam bentuk stiker. Ketika nanti tidak sesuai regulasi yang pada saat pemasangan atau mengupload, akan ada penertiban yang menjadi ranahnya Bawaslu, KPU serta Sat Pol PP," imbuhnya.

Dalam perwal tersebut juga mencantumkan secara detail lokasi yang dilarang untuk pemasangan APK, seperti sepanjang Sumbu Filosofi, beberapa kawasan heritage di Kota Yogya seperti bangunan di Pojok Beteng Kraton, Plengkung Gading,

Plengkung Wijilan, Komplek Pemandian Tamansari, Kawasan Istana Kraton, Kawasan Istana Kadipaten Pura Pakualaman, Situs Warungboto, Taman Adipura serta Alun-alun Utara dan Alun-alun Selatan.

Selain itu juga beberapa ruas jalan antara lain Jalan Jendral Sudirman, Jalan Diponegoro, Jalan Margomulyo, Jalan Malioboro, Jalan Margo Utomo, Jalan Pangurakan, Jalan Sultan Agung, Jalan Simpang Empat Pasar Sentul sampai ke Simpang Tiga Jalan Gajah Mada, seputaran halaman Pakualaman, Jalan Panembahan Senopati, serta Jalan KH. Ahmad Dahlan. **(Dhi) f**

| Instansi | Nilai Berita | Sifat | Tindak Lanjut |
|---|--------------|-------|-----------------|
| 1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu P | Netral | Biasa | Untuk Diketahui |

Yogyakarta, 24 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005